

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR : 445/462/Dinkes,PPKB-Blg/2023

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA (IK)**  
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BALANGAN,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud huruf a diatas, ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis SKPD dan lebih bersifat impact dan/atau minimal outcome

KETIGA : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran kinerja dan bersifat outcome dan/atau output yang berkualitas

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Paringin  
Pada tanggal : Juli 2023

KEPALA



*(Handwritten signature)*

**H. AKHMAD NASAI**

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN,  
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
 BERENCANA KABUPATEN BALANGAN  
 NOMOR :445/462/Dinkes, PPKB-Blg/2023  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR  
 KINERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN  
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026  
 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Menurunnya kematian ibu (hamil, bersalin dan nifas)	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	<p>a. Makna : AKI adalah jumlah wanita yang mengalami kematian akibat gangguan kehamilan atau gangguan penanganannya.</p> <p>b. Alasan Pemilihan : Memonitor kematian terkait dengan kehamilan, persalinan, dan nifas. AKI menggambarkan status kesehatan secara umum, pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan melahirkan.</p> <p>c. Perhitungan atau penjelasan:</p> $\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$	Kepala SKPD	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
2.	Menurunnya kematian bayi usia 0-1 tahun	Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	<p>a. Makna : AKB adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.</p> <p>b. Alasan pemilihan : memonitor kematian bayi yang mencerminkan keadaan derajat kesehatan di masyarakat, karena bayi baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi.</p>	Kepala SKPD	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

3.	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit	<p>a. Makna : kualitas layanan Kesehatan adalah suatu proses pemenuhan kesehatan dan harapan untuk masyarakat baik secara internal maupun eksternal.</p> <p>b. Alasan pemilihan: Upaya untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memberikan kepuasan kepada masyarakat, untuk mendorong fasilitas pelayanan kesehatan mewujudkan budaya mutu melalui tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik, dan untuk meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia di Rumah Sakit.</p> <p>c. Perhitungan atau penjelasan: Berdasarkan Nilai Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit.</p>	Kepala SKPD	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
4	Menurunnya stunting	Prevalensi Stunting	<p>a. Makna : Stunting merupakan kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya (Apabila tinggi badan dan panjang tubuhnya minus 2 dari standar <i>Multicentre Growth Reference Study</i> atau standar <i>deviasi median</i> standar pertumbuhan anak dari WHO atau dengan nilai <i>z-skor</i> nya kurang dari -2SD menurut Kemenkes RI).</p> <p>b. Alasan pemilihan : Memperoleh gambaran terhadap status gizi masyarakat untuk kemudian dilakukan perbaikan baik intervensi gizi sensitif dan gizi spesifik terhadap perbaikan status gizi masyarakat.</p> <p>c. Perhitungan atau penjelasan:  <math display="block">PAB(5)SPstunting = \frac{JAB(5)SPstunting}{JAB(5)} \times 100\%</math> </p> <p><small>Keterangan:  PAB(5)SPstunting : Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (stunting)  JAB(5)SPstunting : Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu  JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama</small></p>	Kepala SKPD	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

5	Terkedalnya penyakit menular dan penyakit tidak menular	Angka Kesakitan	<p>a. Makna : angka kesakitan menunjukkan kepada banyaknya masalah-masalah kesehatan yang diperinci menurut keadaan-keadaan tertentu, diantaranya keadaan waktu, tempat, orang yang mengalami masalah kesehatan.</p> <p>b. Alasan pemilihan: salah satu indikator ukuran kemajuan kesehatan, khususnya kesehatan ibu dalam satu negara.</p> <p>c. Perhitungan atau penjelasan:  <b>rumus Angka Kesakitan</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Penderita}}{\text{Jumlah Populasi}} \times 10^n</math></p>	Kepala SKPD	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
6	Menurunnya angka kelahiran total	Angka Kelahiran total (TFR)	<p>a. Makna : Angka Kelahiran total adalah angka yang menyatakan rata-rata jumlah anak yang dimiliki oleh seorang wanita.</p> <p>b. Alasan pemilihan : indikator untuk menunjukkan ukuran populasi suatu negara atau dapat ditafsirkan sebagai jumlah anak yang dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya yaitu 15 – 49 tahun.</p> <p>c. Perhitungan /penjelasan:  <b>Rumus TFR</b>  <math display="block">TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i</math> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>i</math> = kelompok umur (15-19) th s/d (45-49)th</li> <li>• ASFR = jumlah kelahiran per 1000 perempuan kel umur (15-19)th s/d (45-49) th</li> <li>• Total Fertilty Rate adalah jumlah anak yang akan dipunyai seorang wanita selama masa reproduksinya.</li> </ul> </p>	Kepala SKPD	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
7.	Menurunnya ibu hamil dengan risiko tinggi	Persentase ibu hamil dengan risiko tinggi	<p>a. Makna : ibu hamil dengan risiko tinggi adalah suatu kondisi dimana ibu tersebut dapat mengalami berbagai resiko ketika hamil yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.</p> <p>b. Alasan pemilihan : karena risiko ini tidak hanya dapat berdampak pada ibu, tetapi juga janin di dalam kandungan yang berdampak jangka panjang bagi anak.</p> <p>c. Perhitungan atau penjelasan:  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Ibu hamil dengan risiko tinggi}}{\text{Jumlah Ibu hamil}} \times 100\%</math></p>	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

8.	Menurunnya bayi dengan BBLR	Persentase bayi dengan BBLR	<p>a. Makna : BBLR adalah kondisi bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram tanpa memandang usia gestasi.</p> <p>b. Alasan pemilihan : salahsatu pencegahan stunting, faktor terjadinya stunting pada bayi usia 0-11 bulan adalah bayi BBLR, prematuritas dan penyakit infeksi.</p> <p>c. Perhitungan/ penjelasan :  <math display="block">\frac{\text{Jumlah bayi BBLR}}{\text{jumlah bayi}} \times 100</math></p>	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
9.	Terpenuhinya sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM di fasilitas kesehatan	Persentase gedung fasilitas pelayanan kesehatan yang layak	<p>a. Makna : sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM di fasilitas kesehatan adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam lingkup Kesehatan.</p> <p>b. Alasan pemilihan : untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.</p> <p>c. Perhitungan /penjelasan :  <math display="block">= \frac{\text{Jumlah gedung fasilitas pelayanan kesehatan yang layak}}{\text{jumlah Gedung fasilitas kesehatan}} \times 100</math></p>	Kepala Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
10.	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan	persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	<p>a. Makna : sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Indonesia.</p> <p>b. Alasan pemilihan :Upaya menyediakan SDM kesehatan sesuai kebutuhan yang kompeten.</p> <p>c. Perhitungan/ penjelasan:  <math display="block">= \frac{\text{Jumlah puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar}}{\text{jumlah tenaga kesehatan}} \times 100</math></p>	Kepala Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

11.	Meningkatnya produksi pangan rumah tangga yang aman	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan	<p>a. Makna : pangan rumah tangga yang aman adalah pangan yang tidak mengandung bahaya biologi atau mikrobiologi, bahaya kimia, dan bahaya fisik.</p> <p>b. Alasan pemilihan : untuk menjaga pangan agar selamat serta aman dikonsumsi karena tidak terdapat benda yang mengganggu dan membahayakan kesehatan manusia.</p> <p>c. Perhitungan atau penjelasan:  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Fasilitas pelayanan sesuai standar} \times 100}{\text{Jumlah pelayanan kesehatan}}</math> </p>	Kepala Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
12.	Menurunnya kasus kekurangan gizi	Prevalensi Wasting	<p>a. Makna : kurangnya asupan energi (kalori) dan zat gizi penting yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatannya.</p> <p>b. Alasan pemilihan : kekurangan gizi dapat menyebabkan masalah gizi kronis karena kurangnya asupan nutrisi pada tubuh dalam jangka waktu yang lama.</p> <p>c. Perhitungan/ penjelasan :  <math display="block">\text{(IMT)} = \frac{\text{berat badan (kg)}}{\text{tinggi badan (m)}^2}</math> </p>	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
13.	Meningkatnya desa yang mencapai ODF	Persentase desa yang mencapai ODF	<p>a. Makna : desa yang mencapai ODF adalah Desa/kelurahan yang 100% masyarakatnya sudah melakukan kebiasaan buang air besar di jamban sehat, yaitu mencapai perubahan perilaku pilar satu dari lima pilar STBM yaitu stop buang air besar sembarangan.</p> <p>b. Alasan pemilihan : salahsatu upaya untuk menghilangkan kebiasaan buang air besar sembarangan dan meningkatkan kualitas sanitasi, bertujuan menurunkan angka penyakit berbasis lingkungan seperti diare dapat berkurang.</p> <p>c. Perhitungan atau penjelasan :  <math display="block">\text{Rumus ODF} = \frac{\text{Jumlah desa ODF} \times 100}{\text{Jumlah semua desa}}</math> </p>	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

14.	Meningkatnya rumah tangga yang ber PHBS	Persentase keluarga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	<p>a. Makna : PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.</p> <p>b. Alasan pemilihan : bertujuan untuk memberdayakan anggota sebuah rumah tangga untuk tahu, mau dan mampu menjalankan perilaku kehidupan yang bersih dan sehat serta memiliki peran yang aktif pada gerakan di tingkat Masyarakat</p> <p>c. Perhitungan / penjelasan :  <b>Rumus RT ber PHBS</b>  <u>Jumlah keluarga ber PHBS</u> x 100  Jumlah seluruh keluarga</p>	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
15.	Meningkatnya pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular	Indeks SPM Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	<p>a. Makna : penyakit tidak menular (PTM) adalah penyakit yang tidak ditularkan dari orang ke orang, dan perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis). Dan penyakit menular (PM) adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu individu ke individu lain, baik pada manusia atau hewan.</p> <p>b. Alasan pemilihan : meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat mengenai Penyakit Tidak Menular (PTM) dan penyakit menular (PM), serta meningkatkan <i>skill</i> kader dan tenaga kesehatan untuk menilai atau mendeteksi masyarakat yang berisiko menderita PTM dan PM.</p> <p>c. Perhitungan / penjelasan : Pengisian <i>tools</i> SPM bidang kesehatan</p>	Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

16.	Meningkatnya capaian imunisasi dasar lengkap	Cakupan desa UCI	<p>a. Makna : capaian imunisasi dasar lengkap adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit.</p> <p>b. Alasan pemilihan : menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacaran akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) antara lain difteri, pertussis, tuberculosis (TBC), hepatitis, pneumonia, polio, rubella dan campak.</p> <p>c. Perhitungan/ penjelasan :  <b>rumus Desa UCI</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Desa UCI} \times 100}{\text{Jumlah desa keseluruhan}}</math></p>	Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
17.	Terkendalnya penyakit Potensi KLB/Wabah	Persentase deteksi dini dan respon penyakit potensial KLB/Wabah	<p>a. Makna : KLB/Wabah adalah timbulnya/ meningkatnya kejadian kesakitan /kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat terjadinya wabah. Wabah merupakan kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat pada waktu dan daerah tertentu dan wabah merupakan perluasan KLB yang memiliki dampak lebih luas dan parah.</p> <p>b. Alasan pemilihan : Upaya intervensi karakteristik penyebab dan penyebaran KLB (karakteristik patogen, moda transmisi).</p> <p>c. Perhitungan/ penjelasan :  <b>Rumus</b> =jumlah penyakit yg dilakukan deteksi dini dan respon / jumlah penyakit yang berpotensi KLB atau wabah x 100</p>	Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
18.	Meningkatnya CPR	Persentase <i>Contraceptive Prevalence Rate</i> (CPR)	a. Makna CPR merupakan indikator tingkat prevalensi kontrasepsi modern, prevalensi wanita usia subur yang menggunakan (atau pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi modern pada waktu tertentu.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan KB	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

			<p>b. Alasan pemilihan : CPR merupakan indikator untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk mengatur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat essensial.</p> <p>c. Perhitungan / penjelasan:  <b>Rumus CPR</b>  <math display="block">\frac{\text{jumlah PUS Aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%</math> CPR = Angka Prevalensi Kontrasepsi  PUS = Pasangan Usia Subur  Pus aktif = Jumlah Pasangan Usia subur sebagai peserta KB aktif.</p>		
19.	Menurunnya kelahiran remaja	Angka Kelahiran remaja usia 15 - 19 tahun (ASFR)	<p>a. Makna : kelahiran remaja yaitu jumlah kelahiran pada perempuan kelompok umur 10-14 tahun atau 15-19 tahun pada suatu periode per 1.000 perempuan pada kelompok umur yang sama pada pertengahan periode.</p> <p>b. Alasan pemilihan : Angka ini diperlukan untuk memantau besarnya masalah kelahiran remaja.</p> <p>c. Perhitungan atau penjelasan :  <math display="block">\text{ASFR} = \frac{\text{jumlah kelahiran usia tertentu} \times 1.000}{\text{Jumlah penduduk Remaja usia tertentu}}</math></p>	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan KB	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
20.	Meningkatnya pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	<p>a. Makna : pembangunan keluarga merupakan upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.</p> <p>b. Alasan pemilihan : sebagai upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.</p> <p>c. Perhitungan /penjelasan :  <math display="block">\frac{\text{Jumlah jawaban YA}}{12 - \text{jumlah N}}</math></p>	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan KB	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

21.	Tercapainya pelayanan kesehatan sesuai standar Meningkatnya persalinan di fasilitas kesehatan	Persentase capaian SPM kesehatan ibu Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	<p>a. Makna : Pelayanan Kesehatan Persalinan adalah setiap kegiatan dan serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan.</p> <p>b. Alasan pemilihan : upaya meningkatkan akses pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan kepada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yang memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu, serta tidak memiliki jaminan kesehatan sehingga mencegah kematian ibu dan bayi.</p> <p>c. Perhitungan atau penjelasan: =Jumlah ibu hamil yg mendapatkan pelayanan sesuai standar / jumlah seluruh ibu hamil x 100 =jumlah ibu bersalin di fasilitas Kesehatan/ jumlah seluruh ibu bersalin x 100</p>	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
22.	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar.	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
23.	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar.	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
24.	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar.	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

25.	Tercapainya pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase capaian SPM kesehatan bayi	<p>a. Makna : pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR).</p> <p>b. Alasan pemilihan : tata laksana dan rujukan, gizi, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, imunisasi, rehabilitasi dan perawatan jangka panjang pada penyakit kronis/langka, pola asuh dan stimulasi perkembangan, serta penyediaan lingkungan yang sehat dan aman.</p> <p>c. Perhitungan atau penjelasan: =Jumlah bayi yg mendapatkan pelayanan sesuai standar/ jumlah seluruh bayi x 100</p>	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
26.	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar.	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
27.	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	a. Perhitungan atau penjelasan : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar.	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
28.	Terpenuhinya sarana, Prasarana dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan	Persentase Nilai Kumulatif Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) di Fasilitas Kesehatan	a. Makna : sarana, Prasarana dan alat kesehatan di fasilitas Kesehatan adalah pemenuhan dan ketersediaan, sarana, prasarana dan alat kesehatan merupakan faktor penting di fasilitas pelayanan Kesehatan	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

			<p>b. Alasan pemilihan : peningkatan tata kelola yang baik. Kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan harus dipenuhi dan dikelola dengan Sumber Daya Manusia (SDM), pemenuhan akreditasi, pembiayaan, sistem pelayanan dan rujukan.</p> <p>c. Perhitungan atau penjelasan = Nilai kumulatif pemenuhan SPA / jumlah seluruh nilai x 100</p>		
29.	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	a. Perhitungan / penjelasan : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
30.	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
31.	Tersedianya Puskesmas yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	a. Perhitungan atau penjelasan : Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
32.	Tersedianya Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	a. Perhitungan atau penjelasan : Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
33.	Tersedianya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
34.	Tersedianya Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	a. Perhitungan atau penjelasan : Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

35.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	a. Perhitungan / penjelasan : Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
36.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
37.	Terpeliharanya Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	a. Perhitungan atau penjelasan : Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
38.	Terpeliharanya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	a. Perhitungan atau penjelasan : Jumlah prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
39.	Terpeliharanya Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	a. Perhitungan atau penjelasan : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
40.	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1 : 1.000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	a. Perhitungan / penjelasan: Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

41.	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar, Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1 : 1.000	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
42.	Tersedianya Obat dan Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Kepala UPT Instalasi Gudang Farmasi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
43.	Tersedianya Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Kepala UPT Instalasi Gudang Farmasi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
44.	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusi ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya.	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusi ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya ngan atau penjelasan	Kepala UPT Instalasi Gudang Farmasi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
45.	Terselenggaranya pelayanan di fasilitas kesehatan	Persentase operasional pelayanan kesehatan	a. Makna : operasional pelayanan kesehatan adalah bertanggung jawab atas semua aspek penciptaan barang dan jasa. Ini mengelola sumber daya seperti bahan, mesin, teknologi, dan orang, dan membuat produk dan layanan yang diinginkan	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

			<p>b. Alasan pemilihan : mendorong terciptanya tujuan operasional akan berfokus pada pengelolaan yang efektif dari sumber daya dan aktivitas yang menghasilkan layanan.</p> <p>c. Perhitungan atau penjelasan: =jumlah puskesmas yang operasional pelayanan Kesehatan / jumlah puskesmas x 100</p>		
46.	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	a. Perhitungan / penjelasan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
47.	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	a. Perhitungan atau penjelasan : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
48.	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
49.	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
50.	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

51.	Tersedianya informasi kesehatan dalam penetapan kebijakan	Persentase puskesmas yang menerapkan aplikasi layanan pengelolaan data dan informasi berbasis elektronik terintegrasi	<p>a. Makna : informasi kesehatan adalah pengolahan data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintah secara sistematis dan terintegrasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.</p> <p>b. Alasan pemilihan : Mendukung manajemen kesehatan, Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, Mengintervensi masalah kesehatan berdasarkan prioritas, Pembuatan keputusan dan pengambilan kebijakan kesehatan berdasarkan bukti, Mengalokasikan sumber daya secara optimal, Membantu peningkatan efektivitas dan efisiensi, Membantu penilaian transparansi</p> <p>c. Perhitungan atau penjelasan:  =Jumlah puskesmas yang menerapkan aplikasi layanan pengelolaan data dan informasi berbasis elektronik terintegrasi/ jumlah puskesmas x 100</p>	Sekretaris	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
52.	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Sekretaris	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
53.	Tersedianya Alat/ Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/ Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	a. Perhitungan atau penjelasan: jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Sekretaris	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

54.	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Pelayanan sesuai Standar	<p>a. Makna : mutu dari pelayanan kesehatan adalah standar dan kode profesi yang telah ditetapkan (Azwar, 2010)</p> <p>b. Alasan pemilihan : bertujuan untuk kesesuaian pelayanan kesehatan dengan standar profesi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara baik, sehingga semua kebutuhan pelanggan dan tujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dapat tercapai.</p> <p>c. Perhitungan atau penjelasan: = jumlah puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan sesuai Standar / jumlah puskesmas x 100</p>	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
55.	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
56.	Tersedianya Rumah Sakit Tipe C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindak lanjut Perizinan	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindak lanjut Perizinannya	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindak lanjut Perizinannya	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
57.	Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

58.	Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	a. Perhitungan atau penjelasan:  Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
59.	Terlaksananya Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mempunyai SIP	a. Makna : Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan merupakan kegiatan pengawasan di bidang kesehatan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan b. Alasan pemilihan : Upaya meningkatkan kualitas Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. c. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai SIP/ jumlah tenaga Kesehatan x 100	Analisis Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
60.	Telaksananya Pengendalian Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	a. Perhitungan atau penjelasan:  jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Analisis Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

61.	Terpenuhinya rasio tenaga kesehatan	Persentase Puskesmas yang terpenuhi Kebutuhan SDM	<p>a. Makna : jumlah tenaga kesehatan secara keseluruhan yang tersedia di suatu negara atau wilayah, dan dibagi dengan jumlah penduduk.</p> <p>b. Alasan pemilihan : dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tingkat ketersediaan tenaga kesehatan di suatu daerah.</p> <p>c. Perhitungan / penjelasan : jumlah puskesmas yang terpenuhi Kebutuhan SDM / jumlah puskesmas x 100</p>	Analisis Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
62.	Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Analisis Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
63.	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Analisis Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
64.	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Analisis Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
65.	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar	<p>a. Makna : setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.</p> <p>b. Alasan pemilihan : Pengukuran kompetensi tenaga kesehatan sangat</p>	Analisis Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

			<p>penting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan.</p> <p>c. Perhitungan / penjelasan :          Jumlah Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar/ jumlah seluruh tenaga kesehatan x 100</p>		
66.	<p>Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</p>	<p>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya</p>	<p>a. Perhitungan atau penjelasan:          Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya</p>	<p>Analisis Kesehatan</p>	<p>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS</p>
67.	<p>Terpenuhinya Apotek, Toko Obat, Toko Alkes Kesehatan dan Optikal, UMOT yang memiliki sertifikat izin operasional</p>	<p>Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes Kesehatan dan Optikal, UMOT yang memenuhi syarat penerbitan izin operasional</p>	<p>a. Makna : Surat Izin operasional apotek adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai izin untuk menyelenggarakan Apotek.</p> <p>b. Alasan pemilihan : pedoman atau sistem yang sudah disusun sedemikian rupa untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan berbagai aktivitas di Apotek, Toko Obat, Toko Alkes Kesehatan dan Optikal, UMOT</p> <p>c. Perhitungan atau penjelasan :          Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes Kesehatan dan Optikal, UMOT yang memenuhi syarat penerbitan izin operasional</p>	<p>JF Administrator Kesehatan Ahli Muda</p>	<p>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS</p>
68.	<p>Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan</p>	<p>a. Perhitungan / penjelasan:          jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal,</p>	<p>JF Administrator Kesehatan Ahli Muda</p>	<p>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS</p>

	Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		
69.	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
70.	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
71.	Terpenuhinya sarana P-IRT (Produksi pangan Industri Rumah tangga) yang bersertifikat yang diawasi	Jumlah sarana P-IRT (Produksi pangan Industri Rumah tangga) yang bersertifikat yang diawasi	a. Makna : P-IRT adalah bukti penyampaian komitmen pelaku usaha akan menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan yang diproduksi untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia. b. Alasan pemilihan : PIRT sebagai jaminan bagi para	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

			<p>konsumennya mengenai produk yang ditawarkan oleh si pelaku industri.</p> <p>c. Perhitungan /penjelasan : Jumlah sarana P-IRT (Produksi pangan Industri Rumah tangga) bersertifikat yang diawasi,</p>		
72.	<p>Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</p>	<p>Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</p>	<p>a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan,</p>	<p>JF Administrator Kesehatan Ahli Muda</p>	<p>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS</p>
73.	<p>Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</p>	<p>Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</p>	<p>a.Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga.</p>	<p>JF Administrator Kesehatan Ahli Muda</p>	<p>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS</p>
74.	<p>Terpenuhinya Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memiliki ijin operasional</p>	<p>Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat rekomendasi ijin operasional</p>	<p>a. Makna : Tempat Pengelolaan Makanan (TPM )adalah Usaha pengelolaan makanan yang meliputi jasa boga atau catering, rumah makan dan restoran, depot air minum, kantin, dan makanan jajanan. b. Alasan pemilihan : digunakan sebagai standar Hygiene dan sanitasi agar makanan menjadi bermanfaat dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan</p>	<p>JF Administrator Kesehatan Ahli Muda</p>	<p>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS</p>

			c. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat rekomendasi ijin operasional		
75.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	a. Perhitungan atau penjelasan : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
76.	Terpenuhinya Produksi dan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan yang masih sesuai ketentuan	Jumlah Produksi dan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan yang masih memenuhi ketentuan perizinan	a. Makna : Industri rumah tangga adalah jenis kegiatan usaha berskala kecil yang pada umumnya sering ditemukan pada daerah perkampungan dan sekitar rumah di dalam wilayah kota maupun pedesaan. b. Alasan pemilihan : digunakan sebagai jaminan tertulis yang diberikan oleh bupati atau wali kota terhadap hasil produksi IRT yang memenuhi syarat dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan. c. Perhitungan atau penjelasan : Jumlah Produksi dan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan yang masih memenuhi ketentuan perizinan	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

77.	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
78.	Terlaksananya Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	a.Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
79.	Tercapainya pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persentase capaian SPM kesehatan balita	a. Makna : pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM. b. Alasan pemilihan : Upaya untuk pencegahan infeksi, pelayanan neonatal esensial, pemberian makan bayi dan anak, skrining bayi baru lahir, perawatan BBLR, dan gizi bagi ibu menyusui hingga skiring pada balita. c. Perhitungan atau penjelasan : Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar/ jumlah balita x 100	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

80.	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada Remaja Putri	Jumlah remaja putri yang mendapat kan pelayanan kesehatan sesuai standar	a.Perhitungan atau penjelasan: Jumlah remaja putri yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
81.	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah remaja putri yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	a.Perhitungan atau penjelasan: Jumlah remaja putri yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
82.	Meningkatnya pelayanan pada Calon Pengantin	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	a.Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
83.	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	a.Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
84.	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	a.Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
85.	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	a.Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

86.	Tercapainya pelayanan kesehatan lingkungan sesuai standar	Persentase rumah tangga yang mencapai SBS	<p>a. Makna : kesehatan lingkungan adalah layanan yang menerapkan kebijakan kesehatan lingkungan melalui kegiatan pemantauan dan pengendalian.</p> <p>b. Alasan pemilihan : untuk melakukan korelasi, memperkecil terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan serta kesejahteraan hidup manusia.</p> <p>c. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah rumah tangga yang mencapai SBS / jumlah rumah tangga x 100</p>	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
87.	Terselenggaranya Kabupaten/ Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
88.	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
89.	Tersusunnya peraturan tentang kesehatan	Jumlah Kebijakan yang Berwawasan Kesehatan	<p>a. Makna : Kebijakan kesehatan itu adalah tujuan dan sasaran, sebagai instrumen, proses dan gaya dari suatu keputusan oleh pengambil keputusan, termasuk implementasi serta penilaian</p> <p>b. Alasan pemilihan : untuk menyediakan pola pencegahan, pelayanan yang terfokus pada pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit dan perlindungan terhadap kaum rentan</p> <p>c. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Kebijakan yang Berwawasan Kesehatan</p>	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
90.	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	a. Perhitungan / penjelasan : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

91.	Meningkatnya rumah tangga yang melaksanakan PHBS	Persentase Rumah Tangga (RT) yang telah disurvei PHBS (%)	<p>a. Makna : umah tangga yang sehat dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan PHBS dan menciptakan dukungan lingkungan yang sehat. Rumah tangga PHBS merupakan aset utama pembangunan yang perlu dipelihara terus menerus, ditingkakan dan dilindungi kesehatannya.</p> <p>b. Alasan pemilihan : Upaya tercapainya rumah tangga yang sehat dan bersih.</p> <p>c. Perhitungan atau penjelasan: Rumah Tangga (RT) yang telah disurvei PHBS (%) / seluruh rumah tangga x 100</p>	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
92.	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
93.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan pembinaan	<p>a. Makna : UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk, dan bersama masyarakat, dengan pembinaan sektor kesehatan, lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait lainnya.</p> <p>b. Alasan pemilihan : UKBM sebagai Upaya survailans berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana serta penyehatan lingkungan.</p> <p>c. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah UKBM yang dilakukan pembinaan</p>	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
94.	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

	Daya Masyarakat (UKBM)	Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
95.	Tercapainya pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase capaian SPM pencegahan dan pengendalian penyakit	<p>a. Makna : standar pelayanan minimal dalam lingkup pencegahan dan pengendalian penyakit yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk rakyatnya, dan target SPM harus 100% setiap tahunnya.</p> <p>b. Alasan pemilihan : salahsatu preventif dan pengendalian suatu poenyakit denga tujuan menghalangi perkembangan penyakit dan kesakitan sebelum sempat berlanjut.</p> <p>c. Perhitungan atau penjelasan : Jumlah pelayanan kesehatan pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai standar / jumlah SPM pencegahan dan pengendalian penyakit x 100</p>	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
96.	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
97.	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	a.Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
98.	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	a.Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

99.	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	a.Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
100.	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	a.Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
101.	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	a. Perhitungan atau penjelasan : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	JF Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
102.	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang beresiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	a.Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Orang beresiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	JF Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
103.	Terlaksananya pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi orang dengan Tuberkulosis sesuai standar	Cakupan penemuan dan pengobatan orang Tuberkolusis	a.Perhitungan atau penjelasan: jumlah penemuan dan pengobatan orang Tuberkolusis	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

104.	Terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) sesuai Standar	Persentase orang dengan HIV/AIDS mendapat pengobatan ARV	a. Perhitungan atau penjelasan: jumlah orang dengan HIV/AIDS mendapat pengobatan ARV / jumlah penderita HIV AIDS x 100	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
105.	Tercapainya pelayanan imunisasi dasar lengkap	Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat kan imunisasi dasar lengkap	a. Makna : munisasi dasar lengkap adalah pemberian vaksin tertentu yang diberikan kepada bayi sesuai dengan usianya Imunisasi dasar lengkap sendiri terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 2 dosis DPT-Hepatitis B, 4 dosis polio, dan 1 dosis campak. b. Alasan pemilihan : untuk mengurangi angka penderita yang mengalami suatu penyakit yang sangat membahayakan serta dapat mengakibatkan kematian. c. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah bayi usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap / jumlah bayi usia 0-11 bulan x 100	JF Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
106.	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan, Jumlah bayi usia 0 - 11 yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan, Jumlah bayi usia 0 - 11 yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	JF Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
107.	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	JF Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

108.	Tercapainya pelayanan kesehatan pada penyakit potensi KLB/Wabah	Persentase penyakit yang berpotensi wabah ditangani sesuai standar	<p>a. Makna : KLB/Wabah adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Wabah sendiri didefinisikan sebagai kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat pada waktu dan daerah tertentu dan wabah merupakan perluasan KLB yang memiliki dampak lebih luas dan parah</p> <p>b. Alasan pemilihan : Upaya deteksi dini penyakit yang berpotensi wabah ditangani agar ditangani sesuai standar</p> <p>c. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah penyakit yang berpotensi wabah ditangani sesuai standar / jumlah penyakit yang berpotensi wabah x 100</p>	JF Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
109.	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Pendayagunaan NAPZA	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	JF Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
110.	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Malaria Sesuai Standar	Persentase orang positif malaria di berikan pengobatan OAM	a. Perhitungan atau penjelasan: jumlah orang positif malaria di berikan pengobatan OAM / jumlah penderita positif malaria x 100	JF Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
111.	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	JF Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

112.	Meningkatnya peserta KB baru	Persentase <i>unmet need</i>	<p>a. Makna : peserta KB baru, yaitu PUS yang pertama kali menggunakan kontrasepsi setelah mengalami kehamilan yang berakhir dengan keguguran atau persalinan.</p> <p>b. Alasan pemilihan : persentase AKI dengan tingginya angka <i>unmet need</i>. <i>Unmet need</i> adalah kebutuhan KB yang belum terpenuhi.</p> <p>c. Perhitungan atau penjelasan:  <b>Rumus Unmet Need =</b>  <b>(PUS x Fertilitas) – (Paritas + AKT)</b></p>		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
113.	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Program Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Program Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	JF Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
114.	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	JF Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
115.	Meningkatnya peran penyuluh KB dalam penerapan KB	Persentase PKB/PLKB yang berdaya	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah PKB/PLKB yang berdaya/ jumlah seluruh PKB/PLKB x 100	JF Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

116.	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	JF Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
117.	Tersedianya alat dan obat kontrasepsi KB sesuai kebutuhan	Cakupan ketersediaan kontrasepsi sesuai kebutuhan	a. Makna : Alat kontrasepsi adalah benda atau metode yang berguna untuk mencegah kehamilan. b. Alasan pemilihan : Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dengan mengendalikan kelahiran dan menjamin terkendalinya penduduk. Membentuk keluarga kecil sejahtera, sesuai dengan kondisi ekonomis sebuah keluarga. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi. c. Perhitungan atau penjelasan: jumlah ketersediaan kontrasepsi sesuai kebutuhan	JF Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
118.	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	JF Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
119.	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	a. Perhitungan atau penjelasan : Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	JF Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

120.	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	a.Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	JF Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
121.	Terlaksananya Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	a.Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan.	JF Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
122.	Meningkatnya Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase kampung KB mandiri	a. Makna : Organisasi Kemasyarakatan adalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan b. Alasan pemilihan : dapat meningkatkan pengetahuan organisasi kemasyarakatan dalam pembinaan program kesertaan KB, meningkatkan kemampuan SDM dalam membina dan menggerakkan kelompok organisasi pada masyarakat dalam pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), dan meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam mendorong peran serta organisasi masyarakat dalam pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB, serta Meningkatkan keterampilan peserta dalam mengelola kelompok organisasi kemasyarakatan demi peningkatan pemakaian	JF Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

			<p>kontrasepsi jangka panjang (MKJP).</p> <p>c. Perhitungan atau penjelasan:  Jumlah kampung KB mandiri / jumlah kampung KB x 100</p>		
123.	<p>Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB</p>	<p>Capaian jumlah kampung KB yang memiliki peningkatan klasifikasi</p>	<p>a.Perhitungan atau penjelasan : jumlah kampung KB yang memiliki peningkatan klasifikasi</p>	<p>JF Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda</p>	<p>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS</p>
124.	<p>Terpenuhinya pembinaan kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL, PIK-R, UPPKS,PPKS)</p>	<p>Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina</p>	<p>a. Makna : Pembinaan Kelompok Kegiatan (Poktan) (BKB, BKR, BKL, UPPKA) adalah pertemuan membahas mengenai kegiatan kelompok (BKB, BKR, BKL dan UPPKA) di Kampung KB, kelompok kegiatan (Poktan) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Pelayanan KB Gratis</p> <p>b. Alasan pemilihan : untuk menurunkan prevelensi stunting</p> <p>c. Perhitungan / penjelasan: Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina/jumlah seluruh kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga x 100</p>	<p>JF Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda</p>	<p>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS</p>
125.	<p>Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit</p>	<p>Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL),</p>	<p>a.Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk</p>	<p>JF Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda</p>	<p>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS</p>

	Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk			
126.	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	a.Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	JF Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
127.	Terlaksananya Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	a.Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	JF Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

128.	Tersedianya Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	a.Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	JF Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
129.	Tersedianya Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	a.Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	JF Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
130.	Terpenuhinya organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif dalam pembangunan keluarga	a. Makna : organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk melakukan perbaikan yang diinginkan terhadap kesehatan sosial, kesejahteraan, pendidikan dan fungsi komunitas secara keseluruhan. b. Alasan pemilihan : organisasi kemasyarakatan untuk memberdayakan perempuan dan berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan Indonesia. Kelompok PKK adalah kelompok-kelompok	JF Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

			<p>yang berada di bawah Tim Penggerak PKK desa/kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan.</p> <p>c. Perhitungan atau penjelasan: organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif dalam pembangunan keluarga / organisasi kemasyarakatan x 100</p>		
131.	<p>Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p>	<p>Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p>	<p>a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p>	<p>JF Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda</p>	<p>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS</p>
132.	<p>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p>	<p>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p>	<p>a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p>	<p>JF Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda</p>	<p>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS</p>

133.	Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah regulasi daerah/ dokumen perencanaan yang memanfaatkan GDPK	<p>a. Makna : GDPK adalah sebuah dokumen strategis jangka panjang yang wajib disusun oleh pemerintah pusat maupun daerah. GDPK juga dapat dimanfaatkan sebagai arahan kebijakan yang dituangkan dalam program pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.</p> <p>b. Alasan pemilihan : ntuk menciptakan harmonisasi antara situasi dan kondisi dinamika kependudukan dengan dinamika kondisi sosial ekonomi lainnya dan membantu memperkuat penyusunan dan implementasi perencanaan pembangunan.</p> <p>c. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah regulasi daerah/dokumen perencanaan yang memanfaatkan GDPK</p>	JF Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
134.	Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	a. Perhitungan atau penjelasan : Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	JF Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
135.	Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembang	a. Perhitungan atau penjelasan : Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan	JF Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

	Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/ Kota	an Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/ Kota	Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/ Kota		
136.	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/ Kota	a. Perhitungan atau penjelasan : Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/ Kota	JF Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
137.	Terlaksananya Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	JF Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

138.	Terlaksananya Fasilitasi Kependudukan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal Advokasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Pendidikan Jalur Formal di Satuan	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	JF Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
139.	Terlaksananya pengukuran dan perhitungan indikator kerentanan dampak kependudukan	Cakupan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	a. Makna : pengendalian penduduk adalah kegiatan membatasi pertumbuhan penduduk dengan mengurangi jumlah kelahiran. b. Alasan pemilihan : untuk Meningkatkan koordinasi antara berbagai stakeholder dalam urusan pengendalian penduduk dan KB c. Perhitungan penjelasan: Jumlah pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk/jumlah penduduk x 100	JF Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB,
140.	Dibentuknya Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	JF Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
141.	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	JF Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS
142.	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	a. Perhitungan atau penjelasan: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	JF Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BPS

KEPALA SKPD  
KABUPATEN BALANGAN

**KEPALA**



**H. AKHMAD NASA'I,**